PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Ahmad Yani Nomor 242-244, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235
Tlp. (031) 8294608, Fak. (031) 8294517, Laman kominfo.jatimprov.go.id, Pos-el kominfo@jatimprov.go.id

Surabaya, 27 Oktober 2025

Nomor : 400.4.7/2709/114.4/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran: Satu berkas
Hal : Laporan IHal Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Jawa Timur;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.

Menindaklanjuti disposisi Gubernur Jawa Timur terhadap surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 400.4.7/e-22/Polpum tanggal 1 Oktober 2025 hal Penyampaian Laporan Hasil Indeks Harmoni Indonesia (IHal) Tahun 2025, bersama ini disampaikan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah menginisiasi pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHal). IHal bertujuan untuk menilai tingkat keharmonisan sosial di Indonesia, mencakup faktor ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. IHal merupakan riset terapan sebagai upaya diagnosa terhadap tingkat harmoni di daerah melalui 3 (tiga) aspek pengukuran, yaitu Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA).

Provinsi Jawa Timur diapresiasi atas pencapaian 18 Kabupaten dan 5 Kota yang berhasil melaksanakan pengukuran dan memenuhi target responden. Hasil pengukuran diharapkan menjadi gambaran harmoni di wilayah masing-masing serta sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan penganggaran dan pembangunan daerah berbasis data (*Evidence-Based* Data) melalui tautan https://bit.ly/Laporan-IHal-Prov-Jatim-2025. Sehubungan dengan laporan di atas, mohon bantuannya untuk dapat memfasilitasi penyebarluasan tautan laporan hasil IHal Tahun 2025 dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

Ditanda tangani secara elektronik oleh

SHERLITA R. D. A., S.Si., M.IP.
NIP 197508051998032002

SHERLITA R. D. A., S.Si., M.IP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197508051998032002

Tembusan:
Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Timur.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Lampiran Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 400.4.7/2709/114.4/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025
Hal : Laporan IHal Tahun 2025

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat Telp (021) 3521535
Website : www.polpum.kemendagri.go.id; email : kesbangpol_depdagri@yahoo.co.id

1 Oktober 2025

Nomor : 400.4.7/e-22/Polpum
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025

Yth. Gubernur Jawa Timur

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah menginisiasi pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) yang digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan sosial di Indonesia mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan yang bertujuan untuk memastikan stabilitas sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat kohesi sosial serta memitigasi faktor-faktor yang mempengaruhi harmoni. Pelaksanaan pengukuran dilakukan secara kolaboratif dengan Yayasan Data Kemaslahatan Publik Indonesia atau Wellbeing Institute (WI) dengan menggunakan Metodologi Kemaslahatan (*Wellbeing Methodology*).

IHaI merupakan riset terapan yang dilaksanakan bukan untuk kontestasi melainkan sebagai upaya diagnosa terhadap tingkat harmoni di daerah melalui 3 (tiga) aspek pengukuran yaitu, Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA), agar berbagai potensi permasalahan pembangunan nasional yang bersumber dari keberagaman bangsa Indonesia dapat teridentifikasi.

Tahun 2025, Pengukuran IHaI dilakukan pada 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Kabupaten/Kota di 24 (dua puluh empat) Provinsi dengan waktu pengumpulan data yang berlangsung mulai tanggal 3 s.d. 24 Maret 2025. Sesuai kaidah riset *Wellbeing Methodology* (WM), Kabupaten/Kota dinyatakan berhasil apabila memenuhi target minimal 1.250 responden, sedangkan laporan tingkat Provinsi disusun jika seluruh Kabupaten/Kotanya mencapai target tersebut. Dari 24 (dua puluh empat) Provinsi yang melakukan pengukuran, diperoleh 4 (empat) Provinsi yang memenuhi kriteria, yaitu: Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, DKI Jakarta dan Kalimantan Utara. Adapun jumlah Kabupaten/Kota yang berhasil mencapai target minimal responden adalah 93 (sembilan puluh tiga) Kabupaten dan 26 (dua puluh enam) Kota.

Kami menyampaikan apresiasi atas pencapaian 18 (delapan belas) Kabupaten dan 5 (lima) Kota di Provinsi Jawa Timur yang telah berhasil melaksanakan pengukuran dan memenuhi target responden yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran ini diharapkan dapat memberikan gambaran harmoni di wilayah masing-masing serta sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan penganggaran dan pembangunan daerah berbasis data (*Evidence-Based Data*). Adapun Kabupaten/Kota yang belum berhasil kiranya dapat dilakukan upaya yang lebih optimal pada pengukuran selanjutnya agar kondisi harmoni untuk wilayah Jawa Timur secara keseluruhan dapat diperoleh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Berikut terlampir daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memenuhi dan tidak memenuhi target survei responden. Untuk Kabupaten/Kota yang memenuhi terlampir disertakan *Link* Laporan yang dapat di unduh dan dicetak sesuai kebutuhan. Kiranya berkenan Gubernur meneruskan *Link* dimaksud kepada Bupati dan Wali Kota yang ditembuskan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah masing-masing.

Koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, melalui Sdr. Faris Azhar (082321151041) dan Sdr. Ashar Sunarso (082124441276).

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum,

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si

Tembusan Yth.
Bupati/Wali Kota se Provinsi Jawa Timur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Nomor : 400.4.7/e-22/Polpum
Tanggal : 1 Oktober 2025

1. **Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memenuhi target survei dengan jumlah responden sama dengan atau lebih dari 1.250 orang**

No	Nama Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Responden	Skor IHal
1	Kabupaten Pacitan	1.851	7,04
2	Kabupaten Ponorogo	2.528	6,90
3	Kabupaten Trenggalek	1.990	7,05
4	Kabupaten Blitar	1.346	6,67
5	Kabupaten Kediri	2.283	7,12
6	Kabupaten Malang	4.877	6,90
7	Kabupaten Jember	2.513	6,65
8	Kabupaten Banyuwangi	3.229	7,03
9	Kabupaten Situbondo	2.799	6,81
10	Kabupaten Sidoarjo	1.266	6,99
11	Kabupaten Mojokerto	1.580	6,79
12	Kabupaten Jombang	3.128	6,84
13	Kabupaten Ngawi	2.019	7,07
14	Kabupaten Bojonegoro	3.925	7,23
15	Kabupaten Tuban	1.449	7,01
16	Kabupaten Lamongan	1.456	6,58
17	Kabupaten Pamekasan	1.424	6,92
18	Kabupaten Sumenep	1.881	6,70
19	Kota Blitar	1.344	6,91
20	Kota Probolinggo	1.626	6,95
21	Kota Pasuruan	1.457	7,05
22	Kota Madiun	1.914	7,21
23	Kota Surabaya	1.822	7,30

2. **Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang tidak memenuhi target survei responden**

No	Nama Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Responden
1	Kabupaten Lumajang	169
2	Kabupaten Bondowoso	626
3	Kabupaten Probolinggo	243
4	Kabupaten Pasuruan	764
5	Kabupaten Nganjuk	95
6	Kabupaten Madiun	435
7	Kabupaten Magetan	1.068
8	Kabupaten Gresik	1.100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

9	Kabupaten Bangkalan	886
10	Kabupaten Sampang	705
11	Kabupaten Tulungagung	1.219
12	Kota Kediri	341
13	Kota Malang	241
14	Kota Mojokerto	193
15	Kota Batu	764

3. ***Link*** **Laporan Hasil Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memenuhi target survei sebagaimana angka 1**

https://bit.ly/Laporan-IHaI-Prov-Jatim-2025

Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum,

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.